

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang tengah mengalami perkembangan, terus berupaya mewujudkan pembangunan nasional di sejumlah sektor. Pembangunan diartikan sebagai sebuah transformasi menuju kondisi yang lebih baik lewat langkah-langkah yang dilakukan secara terencana (Kartasamita, 1996). Dalam mencapai pembangunan nasional di berbagai sektor, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang terencana untuk mengumpulkan dana yang mencukupi. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah menjadi hambatan utama dalam hal ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan usaha yang strategis guna mendapatkan dana demi mempercepat pembangunan nasional.

Pentingnya investasi menjadi fokus dalam pembangunan nasional dengan memaksimalkan peran investor atau pengusaha, pernyataan tersebut bisa disusun sebagai berikut:

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1989 mengenai REPELITA V, Bab 7 yang membahas Peningkatan Dunia Usaha mengindikasikan bahwa investasi, terutama yang berasal dari luar negeri, tetap menjadi bagian integral dari pembangunan di berbagai sektor. Fokus utamanya adalah pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan ekspor, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan dari

langkah ini adalah untuk memperkuat daya saing dan pertumbuhan dunia usaha dalam negeri.

Dalam mewujudkan upaya pembangunan nasional di banyak sektor, pemerintah perlu menghimpun dana yang cukup besar. Tetapi, keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan usaha yang strategis guna mendapatkan dana demi mempercepat pembangunan nasional.

Pentingnya investasi menjadi fokus dalam pembangunan nasional dengan memaksimalkan peran investor atau pengusaha. Langkah ini sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1989 tentang REPELITA V. Dalam Bab 7 yang membahas Peningkatan Dunia Usaha, ditegaskan bahwa investasi, terutama yang bersumber dari luar negeri, masih sangat diperlukan dalam pembangunan di berbagai sektor. Terutama ditekankan pada sektor-sektor yang memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor, merangsang pertumbuhan ekonomi, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas dan pertumbuhan dunia usaha dalam negeri.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara, Perkembangan sektor lain seperti transportasi, pendidikan, infrastruktur, gaji, ketenagakerjaan, dan ekspor akan beriringan dengan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua faktor ini saling terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan dikenal bahwa pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan lapangan kerja yang tersedia. Untuk mencapai

visi dan misi pembangunan, diperlukan investasi yang substansial. Investasi diharapkan dapat memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, berfungsi sebagai pendorong utama, dan pada saat yang sama mempercepat pembangunan secara keseluruhan.

Investasi memiliki peran penting dalam kelangsungan proses pembangunan ekonomi. Produksi barang dan jasa di seluruh sektor ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan munculnya aktivitas produksi, kesempatan kerja akan muncul dan pendapatan masyarakat akan meningkat, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan permintaan di pasar. Pertumbuhan pasar menunjukkan peningkatan volume kegiatan produksi, yang berkontribusi pada peningkatan Peluang pekerjaan dan pendapatan lokal akan diperluas, sehingga mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. (Tulus, 2001)

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, investasi sangat penting. Tingkat penanaman modal adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin banyak investor yang menyuntikkan modalnya memberi Indonesia peluang besar untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi baru harus ditambahkan ke stok modal saat ini, menurut teori klasik, model pertumbuhan Harrod-Domar. Investasi atau injeksi modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA), biasanya bergantung pada daya tarik negara dan wilayah. Hal ini memerlukan kondisi yang kondusif, serta kemudahan dan kejelasan dalam prosedur pemasukan modal.

Pengelolaan aset domestik merupakan elemen penting dalam pendapatan negara selain penggunaan dan perbelanjaan pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan nasional yang tidak stabil adalah perubahan yang tidak menentu dalam keinginan untuk berusaha, perkembangan teknologi yang berjalan teratur, dan ketahanan barang modal dalam jangka panjang. Pentingnya tingkat keuntungan yang diantisipasi juga turut memainkan peran utama dalam proses pengambilan keputusan investasi. Investasi, pada dasarnya, menjadi langkah awal dalam upaya pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal memiliki dampak yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan tingkat keaktifan dalam proses pembangunan. Setiap negara berupaya menciptakan kondisi yang memicu investasi, dengan tujuan mengembangkan sektor ekonominya.

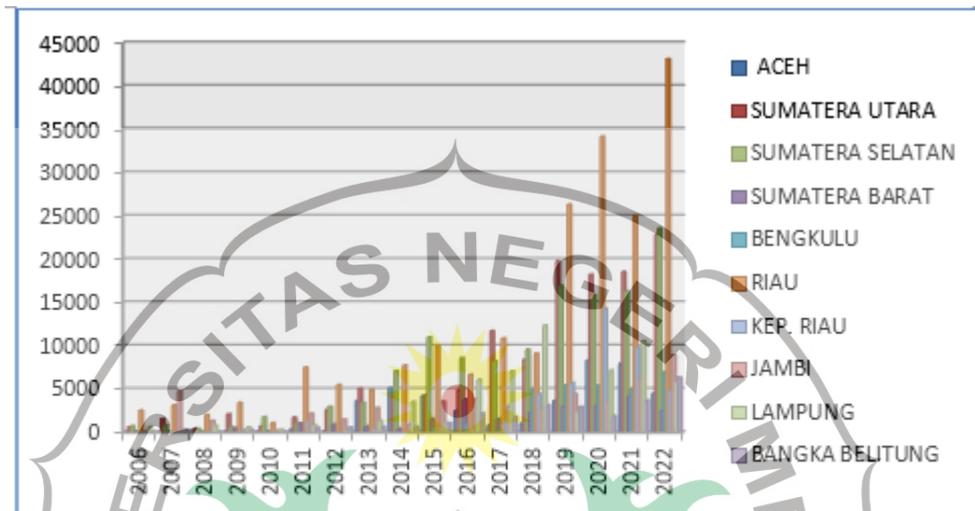
Penanaman Modal domestik merupakan langkah pertama dalam proses pembangunan ekonomi dan memainkan peranan penting dalam menyumbang kepada pendapatan negara. Penanaman Modal domestik boleh dibuat secara langsung oleh pemilik atau secara tidak langsung melalui pembelian bon, saham, deposit, dan simpanan dengan dalam waktu minimum satu tahun. Sebagai bagian daripada struktur berkaitan penggunaan akun negara dan keluaran dalam negara kasar (KDNK), Penanaman Modal domestik diambil sebagai pembentukan modal tetap domestik.

Sebagai komponen utama permintaan agregat dalam ekonomi, penanaman modal memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan proses pembangunan ekonomi dalam negeri (Rizal, 2018). Penanaman modal dalam negeri

menggambarkan pengeluaran investor atau perusahaan untuk memperoleh peralatan dan perlengkapan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa dalam perekonomian, dengan itu mengurangi pergantungan kepada import dari negara lain. Peraturan Penanaman Modal domestik adalah berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dan memberikan kemudahan dan kemudahan kepada penanam domestik dan asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Pemodal yang ingin mengembangkan perniagaan mereka atau menanamkan modal baru boleh memanfaatkan peluang ini.

Investasi dalam negeri memiliki peranan kunci dalam menentukan hasil produksi dan pendapatan, karena peningkatan jumlah investasi tersebut diharapkan dapat merangsang pertumbuhan sektor swasta dan keluarga dalam mengelola sumber daya yang tersedia di daerah tersebut (Simanjuntak, 1982).

Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, dengan luas sekitar 443.065,8 km², dan sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat setelah Jawa. Pertumbuhan ini didorong oleh sumber aslinya yang kaya dan lokasi geografi yang strategik. Sumatera menghasilkan berbagai produk utama termasuk minyak sawit, getah, kayu, petroleum, timah, bauksit, arang batu, dan gas asli. Kebanyakan industri di pulau itu tertumpu kepada pemrosesan produk semula jadi, terutamanya minyak sawit, yang digunakan secara meluas di Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Potensi semula jadi Sumatera yang kurang dimanfaatkan menanti ketibaan pemodal yang akan mengoptimalkannya. Berikut adalah data realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Sumatera.

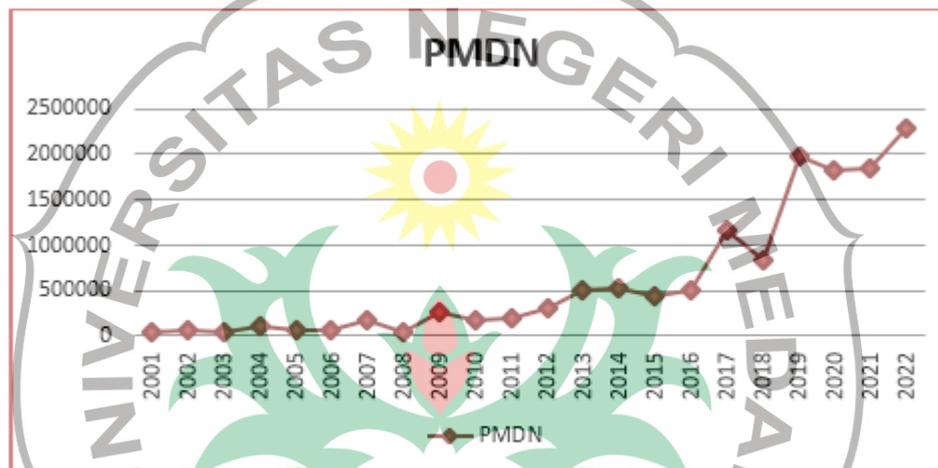


Gambar 1.1
Gambar Realisasi PMDN Pulau Sumatera Tahun 2001-2022
Sumber: BPS Provinsi Sumut (data diolah 2023)

Dari 10 provinsi yang berkontribusi pada Penanaman Modal Dalam Negeri di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi terkemuka di kawasan tersebut. Saat ini, provinsi ini mengalami pertumbuhan signifikan dan aktif berupaya mewujudkan pembangunan di berbagai sektor yang memerlukan dana. Upaya intensif dilakukan untuk menarik minat investor agar berinvestasi di Sumatera Utara, sebagai bagian dari inisiatif pembangunan yang sedang dijalankan. Menurut data yang tersedia, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara menduduki peringkat ketiga di antara provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, dengan Riau menjadi daerah penyumbang tertinggi.

Jika jumlah penanaman modal yang diharapkan dapat terealisasi di Provinsi Sumatera Utara meningkat, ini diharapkan akan memberikan dorongan pada aktivitas ekonomi di wilayah tersebut, berpotensi meningkatkan perekonomian daerah. Semakin besar investasi yang mengalir ke Provinsi Sumatera Utara, maka kemajuan provinsi tersebut akan semakin terwujud, asalkan

pengelolaannya dilakukan secara efektif dan dialokasikan pada sektor-sektor yang memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Berikut ini adalah data tingkat realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara.



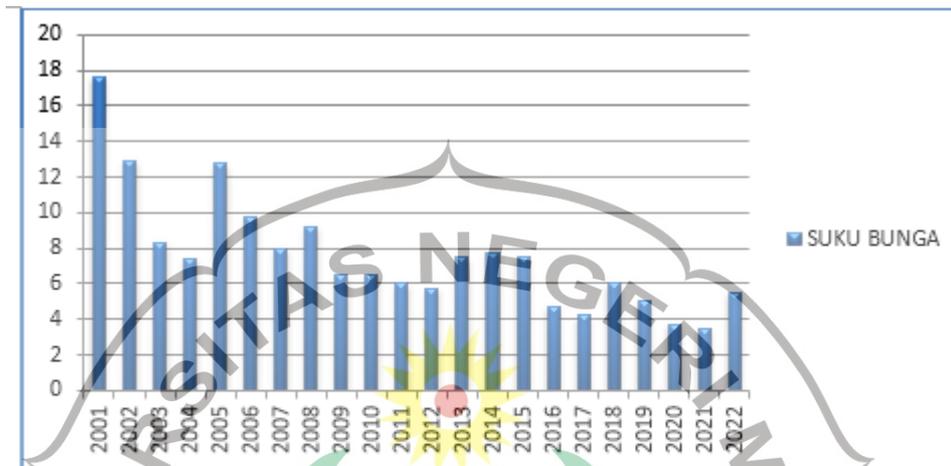
Gambar 1.2
Grafik PMDN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022
 Sumber: BPS Provinsi Sumut (data diolah 2023)

Dalam grafik 1.2, tergambar bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 70,69%, setelah mengalami penurunan pada tahun 2018.

Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah investor yang berkontribusi pada realisasi investasi tahun 2019. Diperlukan strategi atau upaya untuk terus menarik perhatian investor, mengingat ada potensi penurunan minat investor di Sumatera Utara jika pemerintah setempat tidak giat dalam upaya menarik investor. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan investasi PMDN di Sumatera Utara, dengan sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebagai penyumbang terbesar, mencapai 33,48% dari total realisasi PMDN. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut memberikan dukungan berupa insentif dan kemudahan kepada investor.

Faktor-faktor yang berpengaruh pada kegiatan investasi sangat menentukan baik buruknya investasi di suatu daerah atau negara. Salah satu faktor yang signifikan adalah tingkat suku bunga, yang dijelaskan oleh teori Keynes. Teori Keynes memandang investasi sebagai fungsi yang dipengaruhi oleh biaya modal atau tingkat suku bunga dan inflasi, serta menyatakan bahwa jumlah investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel lain. Keynes berpendapat bahwa suku bunga yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan investasi, namun demikian, faktor lain seperti kualitas investasi juga harus dipertimbangkan. Dalam pandangan Keynes, suku bunga memainkan peran penting dalam menentukan keputusan investasi, dengan kecenderungan investasi yang lebih tinggi saat suku bunga lebih rendah. Namun, jika keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih kecil dari suku bunga, investasi tetap rendah atau terbatas.

Suku bunga juga dapat dipandang sebagai pendapatan dari tabungan, dan tinggi rendahnya suku bunga memengaruhi keputusan untuk menabung atau mengeluarkan konsumsi dan investasi. Pemikiran Klasik menyatakan bahwa tingkat bunga memengaruhi investasi, dengan tingkat bunga yang lebih tinggi menyebabkan keinginan untuk berinvestasi yang lebih kecil. Dalam perspektif ini, investor akan lebih cenderung untuk berinvestasi saat tingkat bunga lebih rendah, karena biaya penggunaan dana juga lebih kecil.



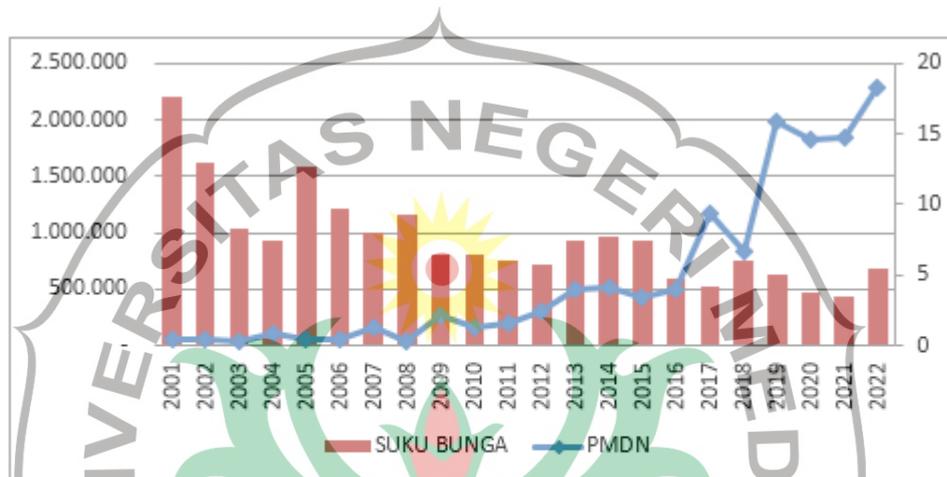
Gambar 1.3
Grafik Suku Bunga di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022

Sumber: Bank Indonesia (BI)

Grafik 1.3 menunjukkan bahwa nilai suku bunga mencapai puncak tertinggi pada tahun 2001, mencapai 17,62%, sementara nilai terendah tercatat pada tahun 2021, yaitu 3,5%. Penurunan tersebut terjadi karena Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level rendah, yakni 3,5%. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap penurunan suku bunga perbankan, yang terus mengalami penurunan. Di sektor kredit, penurunan suku bunga perbankan diteruskan dengan menurunnya suku bunga kredit baru di berbagai kelompok bank. Perbaikan aktivitas ekonomi dan peningkatan mobilitas masyarakat turut mendorong perbaikan persepsi resiko perbankan, yang berkontribusi positif pada penurunan suku bunga kredit baru. Dampak positif ini juga tercermin dalam peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun yang sama.

Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan nilai suku bunga sebesar 5,5%, dipicu oleh kebijakan BI yang terus menaikkan Suku Bunga BI 7-Days

Reverse Repo Rate (BI7DRR). Kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah agresif bank sentral untuk meredam inflasi di Indonesia.



Gambar 1.4
Grafik Suku Bunga Dan PMDN di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022
 Sumber: BPS Provinsi SUMUT Dan Bank Indonesia (BI) (data diolah 2023)

Dari gambar 1.4 menjelaskan bahwa adanya *Gat Data* yang ada pada gambar 1.2 yaitu ketidaksesuaian antara Suku Bunga dengan PMDN, karena tidak sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Keynes bahwa dengan meningkatnya Suku Bunga akan menurunkan PMDN, begitu pula sebaliknya, jika Suku Bunga menurun maka akan meningkatkan PMDN. Akan tetapi pada data yang ada seperti pada data tahun 2013 ke 2014 dimana nilai suku bunga menurun tetapi tidak menaikkan jumlah realisasi PMDN. Selain pada tahun tersebut di tahun 2021 ke 2022 dimana nilai Suku Bunga meningkat justru tidak menurunkan jumlah realisasi PMDN pada tahun yang sama. Dimana hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada.

Perubahan dalam nilai aset, terutamanya Penanaman Modal domestik, boleh dikaitkan dengan beberapa faktor seperti tarif, cukai dan dasar ekonomi.

Berdasarkan beberapa kajian yang dirujuk, faktor utama yang mempengaruhi Penanaman Modal termasuk Penanaman Modal yakni inflasi dan tarif. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menurunkan minat investor untuk menanamkan investasinya, sementara tingkat suku bunga memiliki pengaruh serupa; tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi minat investor, sedangkan suku bunga yang rendah dapat meningkatkan minat investor (Nopirin, 1992).

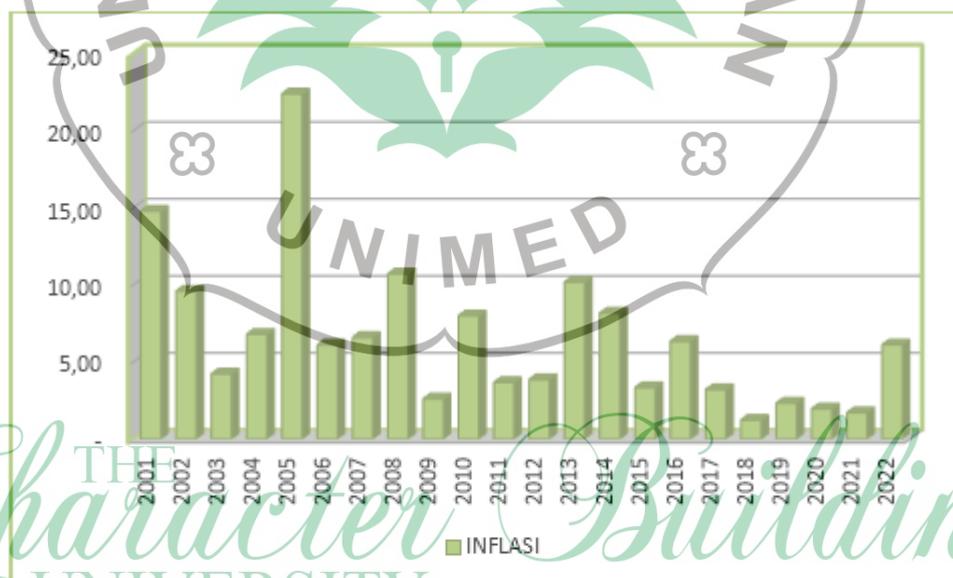
Inflasi dianggap sebagai salah satu faktor penentu investasi dalam teori portofolio Markowitz. Aliran modal ke dalam dan keluar negeri dapat dipengaruhi oleh tingkat inflasi domestik suatu negara. Ketika tingkat inflasi tinggi, biaya investasi menjadi rendah atau harga barang dalam negeri turun karena ketidaksesuaian antara jumlah uang beredar dan barang yang ada di pasar. Hal ini dapat mendorong pemilik modal dan investor untuk menghindari investasi aset di dalam negeri (Mankiw, 2000).

Inflasi, sebagai proses kenaikan harga-harga dalam perekonomian, memiliki dampak negatif pada investasi. Inflasi mengikis nilai uang dari waktu ke waktu, menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Kenaikan tingkat inflasi menyebabkan hasil keuntungan dari investasi tergerus oleh kenaikan harga barang atau jasa. Menurut Sukirno (2005), inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan investasi, di mana inflasi tinggi akan menurunkan investasi, dan sebaliknya, penurunan inflasi akan meningkatkan investasi, sesuai dengan teori ekspansi permintaan agregat dalam kasus klasik (Dornbusch, 2008).

Bank Indonesia mentakrifkan inflasi sebagai kenaikan harga yang umum dan berterusan. Nopirin (1992) percaya bahwa kestabilan total inflasi adalah

penting karena dapat menyediakan pemodal dengan keselamatan Penanaman Modal. Apabila inflasi stabil atau rendah, pemodal lebih cenderung untuk menanamkan modal karena ini bermakna tahap harga umum barang tidak akan meningkat dengan tinggi.

Berhubung dengan kos Penanaman Modal yang tinggi disebabkan oleh inflasi, Nopirin (2012) juga menyatakan bahwa total inflasi yang stabil memberi jaminan kepada Penanaman Modal. Keadaan ini memberikan pemodal lebih ketenangan fikiran untuk menanamkan modal karena paras harga umum komoditi itu tidak akan meningkat dengan drastis.



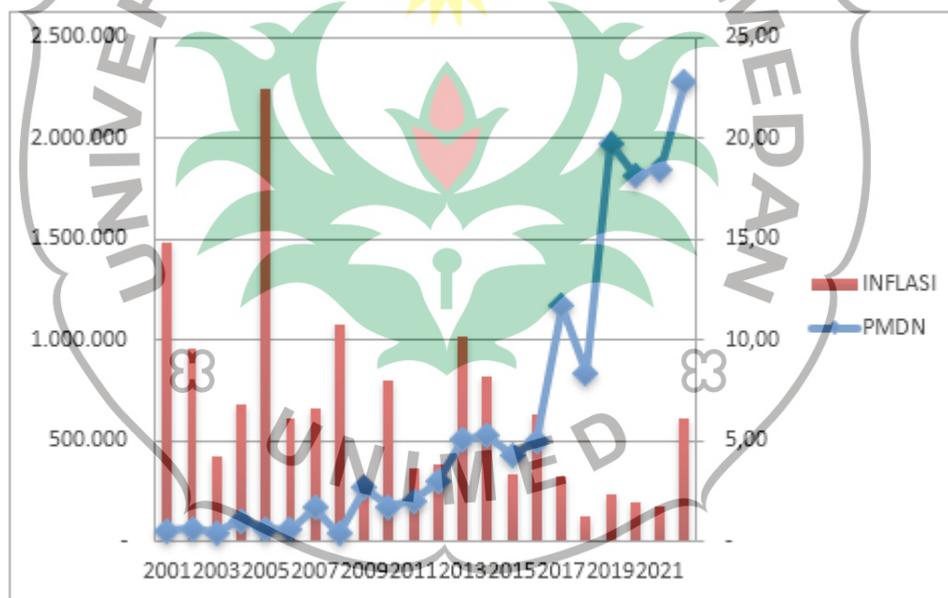
Gambar 1.5

Grafik Inflasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022

Sumber: BPS Prov Sumatera Utara (data diolah 2023)

Dari grafik 1.5, dapat dilihat bahwa perkembangan tingkat inflasi di Sumatera Utara dari tahun 2001 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi mencapai puncak tertingginya pada tahun 2005, mencapai 22,41%. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting bagi para investor dalam pengambilan keputusan

untuk menanamkan modalnya. Korelasi antara tingkat inflasi yang tinggi pada tahun tersebut dan penurunan nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara sebesar 621,643,74 miliar rupiah menjadi terlihat. Peningkatan signifikan dalam tingkat inflasi pada tahun tersebut disebabkan oleh kenaikan harga di semua kelompok barang dan jasa, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).



Gambar 1.6

Grafik Inflasi Dan PMDN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022

Sumber: BPS Prov Sumatera Utara (data diolah 2023)

Pada gambar 1.6 yang disajikan diatas juga terjadi *gat data* yang ada pada gambar 1.2 yaitu ketidaksesuaian antara Inflasi dengan PMDN, karena dengan meningkatnya Inflasi seharusnya bisa menurunkan PMDN, begitu pula sebaliknya, jika Inflasi menurun tentunya bisa meningkatkan PMDN. Namun yang terjadi pada data diatas pada tahun 2018 yang menjadi tahun dengan nilai Inflasi yang paling rendah sebesar 1,23% justru diikuti dengan menurunnya jumlah realisasi PMDN di tahun yang sama. Disusul pada tahun 2019 nilai meningkat akan tetapi PMDN tidak menurun justru meningkat dengan cukup

tajam. Tentunya hal ini menjadikan ketidaksesuaian antara data dengan teori yang ada.

Dalam ekonomi tanpa perdagangan antarabangsa, rancangan penanaman modal banyak dipengaruhi oleh pinjaman sebagai kos hutang untuk membiayai projek penanaman modal. Jika pinjaman meningkat disebabkan oleh kenaikan gaji, menanam modal yang dirancang mungkin akan berkurang. Tahap upah secara langsung mempengaruhi penanaman modal. Gaji yang lebih tinggi boleh meningkatkan penggunaan pekerja, mewujudkan permintaan untuk uang, dan akhirnya menaikkan pinjaman dan mengurangkan penanaman modal. Sebaliknya, penurunan dalam tahap gaji boleh menyebabkan perniagaan mengambil lebih banyak pekerja dan meningkatkan pengeluaran, akhirnya meningkatkan keuntungan dan membawa kepada peningkatan penanaman modal.

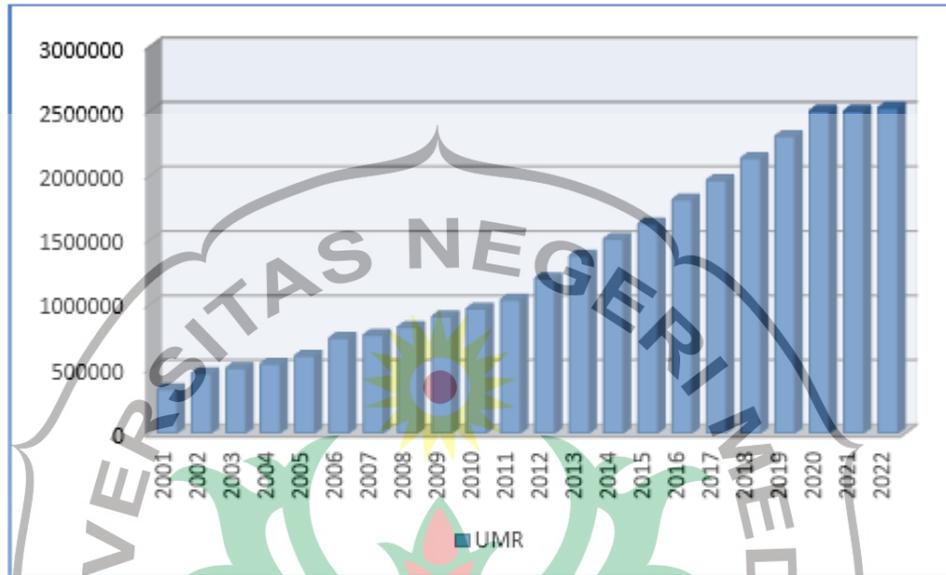
Menurut teori Dunning, kestabilan makroekonomi, ketersediaan kredit, keterbukaan perdagangan, infrastruktur dan kos buruh negara penerima permodalan adalah beberapa faktor makroekonomi yang mempengaruhi penanaman modal. Teori ini membawa kepada kesimpulan bahwa kos buruh, yang boleh dianggarkan daripada gaji pekerja, merupakan salah satu faktor ekonomi yang mempengaruhi prestasi penanaman modal. (Mankiw, 2000).

Sebaliknya, teori Neo Klasik berpendapat bahwa upah pekerja mencerminkan naiknya hasil marginalnya. Menurut teori ini, upah dimaksudkan sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan pekerja kepada pengusaha. Menurut teori ini, Upah adalah bayaran untuk peningkatan nilai pengeluaran yang diterima oleh usahawan daripada pekerja. Mengikut teori neoklasik, upah fleksibel

wujud dalam pasaran buruh di mana tiada pengangguran dan penawaran dan permintaan buruh selalu berada dalam keseimbangan. Dalam kata lain, semua mereka yang boleh bekerja pada tahap gaji tertentu diambil bekerja, dan mereka yang tidak dapat bekerja pada tahap gaji yang sepadan dianggap menganggur (Mankiw, 2007).

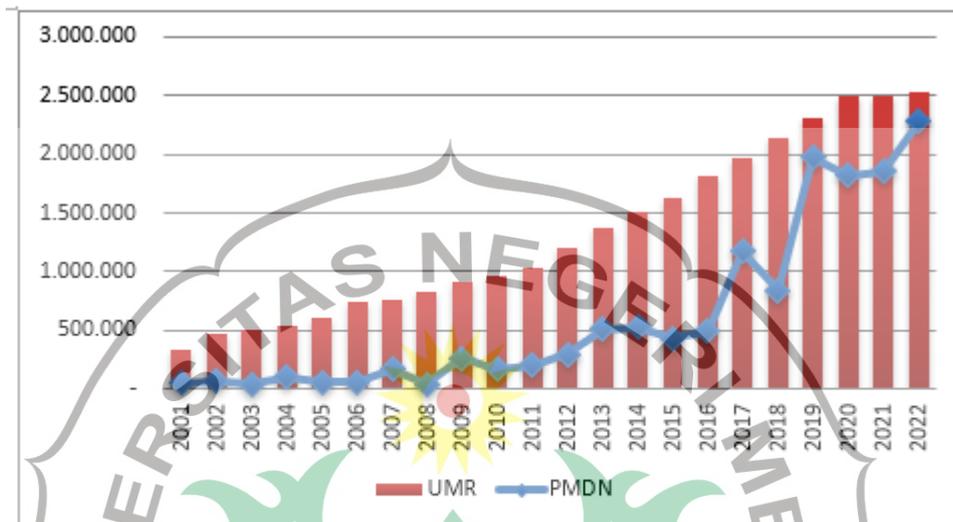
Dalam teori ekonomi, upah didefinisikan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan seseorang dalam hubungan kerja dalam bentuk uang atau barang yang diberikan sesuai dengan perjanjian kerja sebagai imbalan atas usaha kerja yang dilakukan. Pekerja menerima kompensasi yang akan memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka. Dalam ilmu ekonomi, tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi variabel; sebagai imbal jasa dari penawaran tenaga kerja, upah memengaruhi tingkat produksi dan biaya faktor produksi. Penambahan produksi dapat bergantung pada jumlah barang modal yang tersedia, biasanya disebut investasi.

Dalam teori makroekonomi, peningkatan tingkat upah dapat meningkatkan tingkat pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan uang dan mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga, dengan asumsi tetapnya suplai uang. Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif pada investasi, karena dapat menyebabkan penurunan investasi. Oleh karena itu, kenaikan upah dapat memengaruhi biaya bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat investasi.



Gambar 1.7
Grafik Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022
Sumber: BPS SUMUT (data diolah 2023)

Berdasarkan gambar 1.7 tersebut diterangkan kondisi Upah Minimum di Sumatera Utara cukup stabil. Nilai Tingkat investasi rendah disebabkan oleh upah minimum yang tinggi. Situasi ini terjadi ketika perusahaan investor menghadapi peningkatan biaya produksi atau pengeluaran, yang kemudian secara langsung memengaruhi keputusan mereka dalam berinvestasi. Sebaliknya, jika upah turun, perusahaan cenderung meningkatkan investasi mereka. Namun, data yang disajikan menunjukkan bahwa tingkat upah sebenarnya tidak pernah turun.



Gambar 1.8
Grafik Upah Minimum Dan PMDN Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022

Sumber: BPS Prov Sumatera Utara (data diolah 2023)

Dari gambar 1.8 menggambarkan bahwa tentunya terdapat *gap data* yang ada pada gambar 1.2 yaitu ketidaksesuaian antara Upah Minimum dengan PMDN, karena dengan meningkatnya Upah Minimum menunjukkan adanya penambahan biaya produksi yang tentu akan mempengaruhi keputusan investasi. Sebaliknya, apabila tingkat upah mengalami penurunan, akan meningkatkan tingkat investasi.

Hal ini terlihat bahwa nilai Upah Minimum stabil dari tahun ke tahun, tetapi tidak demikian dengan PMDN yang cenderung fluktuatif. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada.

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yang mencakup hubungan antara Suku Bunga, Inflasi, dan Upah Minimum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perangkat lunak Eviews digunakan. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel yang tidak stasioner adalah dengan menggunakan pemodelan koreksi kesalahan.

Dalam kasus di mana sekelompok variabel non-stasioner menunjukkan adanya kointegrasi, pendekatan pemodelan koreksi kesalahan dianggap tepat.

Kajian ini menggunakan *Error Correction Model* (ECM). Model ECM yang digunakan telah melalui beberapa tahapan ujian, termasuk: keputusan yang akan timbul dari keputusan uji yang dilakukan, termasuk uji linearitas data, uji integrasi, uji *Engle-Granger* (EG) dan uji integrasi bersama. Oleh itu, model ECM yang digunakan dianggap sesuai untuk analisis yang dilakukan.

Model *Error Correction Model* (ECM) yakni model yang membetulkan persamaan regresi antara variabel yang tidak stabil secara individu supaya kembali kepada nilai keseimbangan dalam jangka masa panjang. Pendekatan ini mengambil hubungan jangka panjang dan jangka pendek bagi variabel kajian yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan model dan kesenjangan dan ketidakstabilan dalam data.

Penggunaan model ECM dilakukan karena adanya kekhawatiran akan ketidaksesuaian antara jangka pendek dan jangka panjang. ECM dapat memengaruhi keduanya, yakni jangka pendek dan jangka panjang, antara Suku Bunga dan PMDN, Inflasi dan PMDN, serta Upah Minimum dan PMDN.

Penelitian ini bertujuan untuk lebih mendalami Penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang "Analisis Faktor Determinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara" karena fenomena dan masalah yang telah diuraikan di atas.

1.2 Identifikasi Masalah

Pengidentifikasian masalah melibatkan pengumpulan permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian. Berdasarkan penjelasan dalam konteks latar belakang, beberapa permasalahan berikut telah diidentifikasi:

1. Nilai Suku Bunga di Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Terdapat kondisi dimana nilai Suku Bunga meningkat tidak menurunkan PMDN serta di saat nilai Suku Bunga turun tidak meningkatkan PMDN.
2. Nilai Inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2005 di Sumatera Utara tentunya berpengaruh terhadap jumlah realisasi PMDN pada tahun yang sama. Akan tetapi penurunan Inflasi yang terendah terjadi pada tahun 2017 ke 2018 justru di ikuti dengan penurunan realisasi PMDN. Terdapat kondisi dimana nilai Inflasi naik juga di ikuti dengan naiknya realisasi PMDN.
3. Upah Minimum meningkat setiap tahunnya, tetapi PMDN mengalami fluktuatif.
4. Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi, dengan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2022. Variabilitas perkembangan PMDN ini menjadi suatu tantangan di tengah upaya Sumatera Utara dalam menarik dan menyerap modal guna memajukan pembangunan ekonominya.

1.3 Batasan Masalah

Dengan mempertimbangkan identifikasi masalah di atas, untuk menjaga fokus penelitian, peneliti membatasi penggunaan variabel yang akan diikutsertakan, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2022.
2. Variabel independen penelitian ini yaitu suku bunga, Inflasi, dan Upah Minimum di Provinsi Sumatera Utara.
3. Objek penelitian yaitu di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan merinci latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apa pengaruh Suku Bunga terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan panjang?
2. Bagaimana efek Inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan panjang?
3. Bagaimana dampak Upah Minimum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan panjang?
4. Bagaimana dampak gabungan dari Suku Bunga, Inflasi, dan Upah Minimum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menentukan pengaruh Suku Bunga terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan panjang.
2. Untuk menentukan pengaruh Inflasi terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan panjang.
3. Untuk menentukan pengaruh Upah Minimum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara dalam jangka pendek dan panjang.
4. Untuk menentukan pengaruh bersama-sama Suku Bunga, Inflasi, dan Upah Minimum terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Akademi

Bagi kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil kajian ini dapat meningkatkan pemahaman serta menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian serupa, juga dapat menjadi landasan bagi pertimbangan penelitian masa depan.

2. Pemerintah

Untuk pihak pemerintah, diharapkan bahwa hasil riset ini dapat memberikan gambaran yang berguna dalam pembuatan kebijakan terkait Penanaman Modal Dalam Negeri di Indonesia.

3. Investor

Diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi investor dalam membuat keputusan investasi, terutama dalam Penanaman Modal Dalam Negeri.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber data empiris dan referensi untuk membandingkan objek penelitian serupa, khususnya terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Dalam Negeri di Sumatera Utara.



THE
Character Building
UNIVERSITY